

**STRATEGI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
DI DESA KALAOtoa KECAMATAN PASILAMBENA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2023

**STRATEGI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
DI DESA KALAOA KEK. PASILAMBENA
KABUPATEN SELAYAR**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

MUHAMMAD FATWA
NIM:105711105619

***Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi
Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar***

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2023**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Bila kaum muda yang telah belajar disekolah dan mengaggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik Pendidikan itu tidak diberikan sama sekali”.

-Tan Malaka-

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta karunianya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.

Alhamdulillah Rabbil alamin

Skripsi ini kupersembahkan untuk orangtuaku tercinta Orang-orang yang saya sayangi dan almamaterku

PESAN DAN KESAN

Berpikir Besarlah Terlebih Dahulu Baru Bertindak



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Strategi Pembangunan Infrastruktur di Desa Kalaotoa
Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar
Nama Mahasiswa : Muhammad Fatwa
NIM : 105711105619
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan didepan panitia pengujiskripsi strata satu (S1) pada tanggal 30 Agustus 2023 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 30 Agustus 2023

Menyetujui,

Pembimbing I

Prof. Dr. Akhmad M. Si
NIDN:0031126521

Pembimbing II

Dr. Asriati S. E. M. Si
NIDN:00311126303

Mengetahui,

Dekan

Dr. H. Andi Jam'an S. E. M. Si
NBM: 651 507

Ketua Program Studi

Asdar S. E. M. Si
NBM:128 6845



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

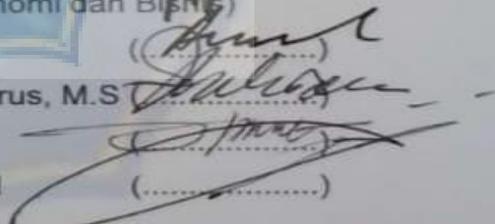
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

HALAMAN PENGESAHAN

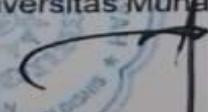
Skripsi atas Nama Muhammad Fatwa, Nim 105711105619 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor :0010/SK-Y/60201/091004/2023, Tanggal, 13 shafar 1445 H/ 30 Agustus 2023 Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 13 shafar 1445 H
30 Agustus 2023

PANITIA UJIAN

- | | | |
|------------------|---|---|
| 1. Pengawas Umum | : Prof. Dr. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar) |  |
| 2. Ketua | : Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) |  |
| 3. Sekretaris | : Agusdiwana Suarni, S.E., M.ACC
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) |  |
| 4. Penguji | : 1. Prof. Dr. Akhmad, M.Si
2. Dr. H. Muhammad Ikram Idrus, M.S
3. Dr. Asriati, S.E., M.Si
4. Ismail Rasulong, S.E., M.M |  |

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar


Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM :651 507



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fatwa
Stambuk : 105711105619
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Judul Skripsi : Strategi Pembangunan Infrastruktur di Desa Kalaotoa
Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan
Selayar

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 30 Agustus 2023

mbuat Pernyataan,



Muhammad Fatwa
NIM:105711105619

Diketahui Oleh:

Dekan,

Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM : 651 507

Ketua Program Studi

Asdar, S.E., M.Si
NBM : 128 6845

HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fatwa
NIM : 105711105619
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

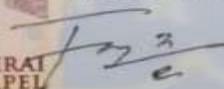
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Strategi Pembangunan Infrastruktur di Desa Kalaotoa Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 30 Agustus 2023

embuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL
10000
C127AAKX631574543

Muhammad Fatwa
NIM:105711105619

KATA PENGANTAR

حَمْدُكَ يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ
حَمْدُكَ يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Strategi Pembangunan Infrastruktur di Desa Kalaotoa Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar” Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada kedua orang tua penulis bapak Basri dan ibu Salingai yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi tingginya dan terimakasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah

Makassar.

2. Bapak Dr. H. Andi Jam an, SE., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Asdar, SE., M.Si, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Prof. Dr. Akhmad, M.Si, selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Ibu Dr. Asriati, SE., M.Si, selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Bapak Penasehat Akademik yang senantiasa membimbing penulis selama masa perkuliahan.
8. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
9. Kepala Desa Kalaotoa Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah bersedia menerima penulis untuk mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian studi.
10. Terimakasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang Budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu alaikum Wr.Wb

Makassar, 28 Juni 2023

Muhammad fatwa



ABSTRAK

MUHAMMAD FATWA, Tahun 2023. Strategi Pembangunan Infrastruktur di Desa Kalaotoa Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar. Skripsi. Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh: Pembimbing I Bapak Akhmad dan Pembimbing II Ibu Asriati.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Pembangunan Infrastruktur di Desa Kalaotoa Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode Deskriptif Kualitatif dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pembangunan infrastruktur di Desa Kalaotoa Melalui proses yang tersistematis dan melakukan peningkatan di berbagai bidang kehidupan masyarakat baik dalam bidang Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Kesehatan dan Keagamaan dengan melaksanakan pembangunan infrastruktur yang menunjang berbagai bidang kehidupan masyarakat.

Kata Kunci: Strategi Pembangunan Infrastruktur, Penggunaan Dana Desa



ABSTRACK

MUHAMMAD FATWA, 2023. Infrastructure Development Strategy in Kalaotoa Village, Pasilambena District, Selayar Islands Regency. Skripsi. Development Economics Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by: Advisor I Mr. Akhmad and Advisor II Mrs. Asriati.

This study aims to determine the Infrastructure Development Strategy in Kalaotoa Village, Pasilambena District, Selayar Islands Regency. The type of research used is a qualitative descriptive method by conducting observations, interviews and documentation. The results of the study show that the infrastructure development strategy in Kalaotoa Village is through a systematic process and makes improvements in various areas of community life both in the fields of Education, Social, Economy, Health and Religion by carrying out infrastructure development that supports various areas of community life.

Keywords: Infrastructure Development Strategy, Use of Village Funds



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN KARYA ILMIAH	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACK	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6

A.	Tinjauan Teori.....	6
1.	Pengertian Perencanaan Pembangunan	6
2.	Manfaat Perencanaan Pembangunan	6
3.	Tahapan Perencanaan Pembangunan	7
4.	Pengertian Infrastruktur	9
5.	Jenis Jenis Infrastruktur.....	9
6.	Non Infrastruktur.....	10
7.	Alokasi Dana Desa (ADD)	11
8.	Perencanaan ADD.....	12
9.	Penganggaran ADD	13
B.	Tinjauan Empiris	13
C.	Kerangka Konsep	20
BAB III	METODE PENELITIAN	22
A.	Jenis Penelitian.....	22
B.	Fokus Penelitian	22
C.	Situs dan Waktu Penelitian	22
D.	Jenis dan Sumber Data.....	22
E.	Informan Penelitian	23
F.	Teknik pengumpulan data	23
G.	Metode Analisis Data	24
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	26
A.	Gambaran Umum Objek Penelitian	26

1. Sejarah Desa Kalaotoa.....	26
2. Demografi Desa Kalaotoa.....	26
B. Penyajian Data (Hasil Penelitian)	27
1. Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Kalaotoa.....	27
2. Program Pembangunan Desa	32
3. Starategi Pembangunan Infrastruktur Desa Kalaotoa	35
4. Arah Pembangunan Infrastruktur Desa Kalaotoa.....	38
BAB V PENUTUP	40
A. Kesimpulan.....	40
B. Saran 40	
DAFTAR PUSTAKA	41
LAMPIRAN.....	41



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jumlah Informan.....	23
Tabel 4.1 Jadwal Pelaksanaan Musyawarah.....	26
Tabel 4.2 Urutan Pelaksanaan dan Penyusunan RPJMDesa.....	28
Tabel 4.3 Pendapatan Desa Kalaotoa Tahun Anggaran 2023.....	34
Tabel 4.4 Pengeluaran Desa Kalaotoa Tahun Anggaran 2023.....	35



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 **Kerangka Konsep**21



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	42
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara.....	46
Lampiran 3 coding Wawancara.....	52



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tantangan utama pembangunan Indonesia disaat ini ialah menangani permasalahan ketimpangan yang tidak cuma berlangsung dalam ukuran pribadi maupun rumah tangga namun pula daerah(Sukwika, 2018). Hal ini disebabkan karena secara ekonomi Indonesia belum sejahtera dan kepadatan penduduk juga sangat tinggi. Adapun juga masalah kemiskinan, pengangguran, dan juga tingkat kesejahteraan penduduk, sehingga pembangunan di Indonesia sangat di perlukan dan juga Pembangunannya harus sitematis dan merata, agar tercapai Keseimbangan dalam pembangunan. Yang menjadi penyebab dari terhambatnya pembangunan adalah kemiskinan, sehingga pemerintah Indonesia menjadikan kemiskinan sebagai tujuan utama dalam pembangunan .

Agar tercapainya pembangunan yang merata, maka setiap daerah perlu adanya pembangunan, sehingga mampu mengurangi ketimpangan antar daerah. Pembangunan yang paling sering dilaksanakan adalah pembangunan infrastruktur ,hal ini disebabkan karena infrastruktur dapat menjadi roda penggerak dalam perekonomian.

Sebelum melaksanakan pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur perlu disusun strategi atau rencana pembangunannya terlebih dahulu. Strategi pembangunan merupakan suatu perencanaan yang disusun oleh pemerintah yang melibatkan masyarakat. perencanaan memerlukan informasi dan data yang memadai agar perencanaan dapat tersusun dengan baik. Dalam wilayah pedesaan, Perencanaan pembangunan harus memperhatikan kebutuhan penduduk, alokasi dana desa dan sumber daya desa (Fitrianti et al., 2022). Suatu perencanaan pembangunan yang baik harus

melibatkan masyarakatnya sehingga apa yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Informasi dan data yang digunakan juga harus relevan agar perencanaan bisa efektif dan efisien.

Dalam melaksanakan suatu pembangunan di perlukan partisipasi masyarakat dalam tahapan-tahapan pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pemanfaatan dan tahap evaluasi (Mustanir et al., 2018).

Pembangunan infrastruktur ialah wujud dari kepedulian pemerintah, bentuk dari model pembangunan tersebut ialah program pembangunan infrastruktur pedesaan (PIIP) (Simbolon et al., 2021). Pembangunan infrastruktur memiliki dampak yang sangat penting karena memberikan kemudahan dalam beraktifitas dan juga pemenuhan kebutuhan hidup. Dengan adanya infrastruktur ini kualitas kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, dan roda perekonomian dapat berjalan dengan lancar.

Pembangunan infrastruktur di desa harus menunjang perekonomian masyarakat desa dan mengatasi berbagai permasalahan di desa. Sesuai dengan Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang desa yang menjelaskan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas kehidupan masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan infrastruktur desa perlu juga dilakukan perencanaan alokasi dana desa (ADD). Perencanaan ADD diperlukan agar penggunaan dana dapat secara efektif, efisien, dan ekonomis serta tepat sasaran. Alokasi dana desa (ADD) merupakan suatu bentuk hubungan keuangan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa. Perumusan ADD harus dapat meningkatkan pembangunan desa dan dana desa dapat digunakan

sebagaimana mestinya (Pratama, 2019).

Alokasi Dana Desa (ADD), desa berpeluang guna mengelola pembangunan, pemerintahan serta social kemasyarakatan desa secara otonom. ADD ialah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat serta wilayah yang diterima oleh Kabupaten/Kota (Mustanir et al., 2018)

Desa kalaotoa merupakan salah satu dari lima desa dan kelurahan di kec. Pasilambena yang terletak di kabupaten kepulauan selayar, Sulawesi selatan. Daerah ini merupakan daerah penghasil kopra dan juga sebagian besar masyarakatnya adalah petani. Sehingga pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam menunjang kegiatan perekonomiannya.

Maka dari itu peneliti ingin mengetahui secara jelas strategi pembangunan infrastruktur yang akan disusun oleh pemerintah desa Kalaotoa, Kec. Pasilambena, Kab. Kepulauan Selayar, agar infrastruktur yang di bangun dapat dapat menunjang kegiatan ekonomi masyarakat. Untuk itu peneliti mengadakan suatu penelitian yang berjudul **“STRATEGI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA KALAOtoa KEC.PASILAMBENA KAB.KEPULAUAN SELAYAR”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang di paparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa kalaotoa, kec. Pasilambena, kab. Kepulauan selayar?
2. Bagaimana strategi pembangunan infrastruktur di Desa Kalaotoa, Kec. Pasilambena, Kab.Kepulauan Selayar?

3. Bagaimana arah pembangunan infrastruktur di Desa Kalaotoa, Kec. Pasilambena, Kab.Kepulauan Selayar?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Dapat mengetahui penggunaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Kalaotoa, Kec. Pasilambena, Kab. Kepulauan Selayar.
2. Dapat mengetahui strategi pembangunan infrastruktur di Desa Kalaotoa, Kec. Pasilambena, Kab. Kepulauan Selayar.
3. Dapat mengetahui arah pembangunan infrastruktur di Desa Kalaotoa, Kec.Pasilambena. Kab.Kepulauan Selayar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi penulis
Penelitian ini menjadi syarat untuk menyelesaikan studi di jurusan ekonomi pembangunan fakultas ekonomi dan bisnis universitas Muhammadiyah makassar.
2. Bagi pembaca
Penelitian ini bisa menjadi rujukan dalam melakukan penyusunan perencanaan pembangunan infrastruktur.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pengertian Perencanaan Pembangunan

Tjokroamidjojo (1984), mengartikan perencanaan pembangunan merupakan orientasi untuk menggunakan sumber daya pembangunan yang terbatas (termasuk sumber daya ekonomi) untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan kondisi social ekonomi yang lebih baik secara efektif.

Berdasarkan UU No.25 Tahun 2004 Perencanaan pembangunan Nasional merupakan suatu proses dalam menetapkan suatu keputusan yang tepat di masa depan, Melalui pilihan yang tersistematis, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.

Berdasarkan dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan merupakan merupakan suatu bentuk pemikiran dalam penggunaan sumber daya alam untuk menghasilkan rancangan pembangunan dalam jangka Panjang, jangka menengah, dan tahunan untuk mencapai tujuan tertentu.

2. Manfaat Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan diharapkan dapat Menciptakan pembangunan yang memiliki manfaat langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat. Perencanaan pembangunan harus seimbang agar tujuan pemanfaatannya tidak menimbulkan masalah.

Manfaat dari perencanaan pembangunan menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1994) yaitu:

- a. Adanya prosedur dalam menjalankan kegiatan yang di maksudkan agar tercapai tujuan dari pembangunan.
- b. Perkiraan permasalahan dalam periode pelaksanaan yang akan dilalui. Dalam evaluasi tersebut, tidak hanya disebutkan potensi dan prospek pengembangannya, tetapi juga potensi hambatan dan risikonya. Perencanaan bertujuan untuk meminimalkan ketidakpastian dan ada peluang untuk memilih opsi yang berbeda.
- c. Tentang cara terbaik atau kemungkinan memilih kombinasi cara terbaik.
- d. Dapat dilakukan dengan menyusun skala prioritas untuk memilih urutan berdasarkan kepentingan, tujuan, sasaran atau kegiatan usaha.
- e. Adanya alat ukur untuk melakukang monitoring dan evaluasi.
- f. Penggunaan dan alokasi sumber daya pembangunan yang langka secara lebih efektif dan efisien. Upaya yang dilakukan untuk menghindari pemborosan dalam dalam upaya mencapai produksi yang maksimal dari sumber yang tersedia.

3. Tahapan Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan agar memperoleh hasil yang terbaik harus melewati tahapan-tahapan. Adapun menurut Tjokroamidjojo (1984) tahap-tahap dalam proses perencanaan adalah:

a. Penyusunan rencana

Penyusunan rencana terdiri dari unsur-unsur:

- 1) Tinjauan keadaan. Baik berupa review sebelum dimulainya rencana (check before take-off) atau sebagai review pelaksanaan rencana sebelumnya (performance evaluation). Kegiatan ini bertujuan untuk mengimplementasikan dan mengidentifikasi permasalahan utama, kemajuan yang telah diperoleh, kendala yang masih ada, serta peluang dan prospek yang masih dapat

dikembangkan.

- 2) Perkiraan kondisi masa depan yang akan dialami oleh rencana (forecast).
Data statistik, berbagai hasil penelitian dan Teknik ekstrapolasi diperlukan.
Mekanisme informasi untuk menentukan tren masa depan.
- 3) Penentuan tujuan perencanaan (planning objective) dan pemilihan metode untuk mencapai tujuan perencanaan. Nilai-nilai politik dan sosial seringkali memainkan peran yang sangat penting dalam menetapkan dan mencapai tujuan untuk hasil terbaik.
- 4) Tahap persetujuan rencana. Proses pengambilan keputusan memiliki tingkatan dari keputusan di bidang teknis kemudian mengarah ke proses politik.

b. Penyusunan program kerja

Perumusan tujuan yang lebih rinci untuk jangka waktu tertentu, pelaksanaan rencana kegiatan, Besaran, pendanaan dan penetapan kerjasama antar Lembaga atau institusi pelaksanaan program pembangunan. Pelaksanaan dan pendanaan yang konkrit dari pada pelaksanaan proyek pembangunan dalam perfect form. Bahkan ini menjadi alat rencana, alat pembiayaan, alat pelaksanaan dan alat evaluasi rencana yang penting.

c. Pelaksanaan rencana

Seringkali perlu dibedakan antara fase penelitian, fase konstruksi dan fase operasional. Fase operasional harus diperlukan sebagai kegiatan pemeliharaan.

d. Pengawasan atas pelaksanaan rencana

Tujuan dari pengawasan adalah:

- 1) Memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

2) Jika terjadi penyimpangan, Perlu diketahui sejauh mana penyimpangan tersebut dan penyebabnya.

4. Pengertian Infrastruktur

Berdasarkan pandangan Neil S. Grigg tentang infrastruktur merupakan suatu system berbentuk material yang menyediakan sarana pengairan, drainase, transportasi, bangunan Gedung, dan fasilitas fisik yang diperlukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar manusia, baik kebutuhan ekonomi maupun social.

Adapun defenisi infrastruktur menurut N. Gregory Mankiw dalam ilmu ekonomi, yaitu suatu bentuk modal publik atau public capital yang terdiri dari jembatan, jalanan umum, system drainase, dan lainnya sebagai salah satu investasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Menurut defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa infrastruktur merupakan suatu modal publik atau public capital yang terdiri dari fasilitas-fasilitas fisik seperti, sarana pengairan, transportasi, drainase, bangunan Gedung, dan lainnya sebagainya yang bisa memenuhi kebutuhan manusia baik dalam bidang ekonomi maupun social.

5. Jenis Jenis Infrastruktur

Adapan jenis-jenis infrastruktur yaitu;

a. Infrastruktur keras

Infrastruktur keras merupakan suatu infrastruktur yang dapat dilihat bentuk fisiknya secara jelas. Bentuk dari infrastruktur ini meliputi bandara, jalan raya, pelabuhan, saluran irigasi dan fasilitas umum lain.

b. Infrastruktur keras non fisik

Cakupan dari infrastruktur ini adalah segala macam upaya yang dilakukan untuk mendukung sarana dan prasarana umum yang digunakan dalam

menunjang kegiatan social dan ekonomi masyarakat umum. Misalnya yaitu segala bentuk yang berhubungan dengan penyediaan sumber pasokan energi.

c. **Infrastruktur lunak**

Infrastruktur lunak adalah segala bentuk system atau peraturan yang menunjang kegiatan social dan ekonomi masyarakat. Contohnya layanan public, penerapan etika kerja yang baik dan benar, dan juga peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang menunjang kegiatan social dan ekonomi.

d. **Infrastruktur keras**

Infrastruktur keras merupakan suatu infrastruktur yang dapat dilihat bentuk fisiknya secara nyata. Jenis dari infrastruktur ini meliputi bandara, jalan raya, pelabuhan, saluran irigasi dan fasilitas umum lain.

e. **Infrastruktur keras non fisik**

Cakupan dari infrastruktur ini adalah segala macam upaya yang dilakukan untuk mendukung sarana dan prasarana umum yang digunakan dalam menunjang kegiatan social dan ekonomi masyarakat umum. Misalnya yaitu segala bentuk yang berhubungan dengan penyediaan sumber pasokan energi.

f. **Infrastruktur lunak**

Infrastruktur lunak merupakan segala bentuk system atau peraturan yang menunjang kegiatan social dan ekonomi masyarakat. Contohnya layanan public, penerapan etika kerja yang baik dan benar, dan juga peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang menunjang kegiatan social dan ekonomi.

6. Non Infrastruktur

Pembangunan Non Infrastruktur Merupakan suatu pembangunan yang berupa pemberdayaan masyarakat yang bukan hanya meningkatkan produktifitas saja akan tetapi diikuti dengan perubahan stuktur sosial dan ekonomi masyarakat. Salasatu bentuk pemberdayaan ini antara lain Peningkatan peran wanita melalui kegiatan kegiatan didalam PKK, kegiatan karang taruna

dan lain sebagainya.

7. Alokasi Dana Desa (ADD)

Sesuai UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, dana desa merupakan dana yang diperuntukkan bagi desa yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang di transfer ke kabupaten/kota melalui pendapatan dan belanja daerah dan dimanfaatkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi dana desa merupakan dana perimbangan yang diterima oleh APBD kabupaten/ kota setelah dikurangi oleh dana alokasi khusus. Alokasi dana desa yang dimaksud adalah paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang di terima oleh kabupaten/ kota setelah dikurangi oleh dana alokasi khusus.

Alokasi dana desa (ADD) adalah dana yang di peroleh pemerintah desa dari pemerintah daerah yang 30% digunakan untuk belanja aparatur dan operasional sedangkan 70% untuk belanja publik serta pemberdayaan masyarakat (Sanusi & Dumlani, 2019).

Abdur Rozaki menjelaskan dalam prakarsa desentralisasi dan otonomi desa, bahwa kebijakan alokasi dana desa memiliki salah satu tujuan utama, yaitu mereformasi ortodoksi pemerintah kabupaten dalam memberikan kewenangan, pelayanan, dan bantuan kepada pemerintah dibawahnya, yang mana adalah pemerintah desa.

Berdasarkan peraturan pemerintah nomer 60 tahun 2014 tentang dana desa yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), didistribusikan secara merata berdasarkan pada Alokasi dasar dan perhitungan Alokasi dengan memperhatikan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan dari suatu desa secara geografis di setiap wilayah

di Indonesia.

Dana Desa diprioritaskan untuk dialokasikan dalam pembiayaan dibidang pemberdayaan masyarakat, berdasarkan kondisi dan potensi desa, sesuai dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahun dengan sarana sebagai berikut:

- a. Dana desa diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, meliputi:
 - 1) Pembangunan puskesmas dan polindes
 - 2) Pengelolaan dan pembangunan posyandu
 - 3) Pembinaan dan pendidikan anak usia dini (PAUD)
- b. Dana desa yang digunakan dalam pembangunan harus diprioritaskan terhadap sarana dan prasarana desa, yang diantaranya meliputi:
 - 1) Pembangunan dan peningkatan kualitas jalan desa
 - 2) Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana jalan usaha tani.
 - 3) Pembangunan dan peningkatan pengairan terhadap lahan pertanian.
 - 4) Pengembangan energi baru dan terbarukan.
 - 5) Pembangunan dan pengembangan pengolahan lingkungan.
 - 6) Pengembangan dan pengelolaan air bersih di tingkat desa.
 - 7) Pembangunan dan pelestarian saluran air.
- c. Dana desa bertujuan untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam mengembangkan kegiatan kewirausahaan, meningkatkan pendapatan, dan memperluas skala ekonomi masyarakat desa.

8. Perencanaan ADD

Perencanaan ADD dilaksanakan dengan menyaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat lewat Musyawarah desa atau rembung desa. Dalam musyawarah desa dibahas mengenai perencanaan anggaran pendapatan dan

belanja desa (APBDesa), serta musyawarah rencana pembangunan desa sehingga diperoleh RPD (Rencana Penggunaan Dana).

9. Penganggaran ADD

Penganggaran ADD dilaksanakan setelah hasil dari musyawarah desa dan disetujui oleh seluruh pihak yang terikat di desa, sehingga dapat disusun RPD selama satu tahun. Menurut peraturan menteri dalam negeri No. 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Dari kedua peraturan tersebut, ditegaskan bahwa penggunaan anggaran ADD adalah sebesar 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan sebesar 30% untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD.

B. Tinjauan Empiris

1. Putra hidayat dan Salahuddin (2021)

Judul penelitian ini adalah perencanaan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan sebuah kajian pustaka terstruktur. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa dalam merencanakan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan baik dibidang transportasi maupun pengelolaan sumber daya alam perlu dapat memberikan pengaruh positif terhadap lingkungan dan juga masyarakat itu sendiri, karena tentu jika tujuannya adalah pembangunan yang berkelanjutan, Anda harus dapat mempertimbangkan perencanaan pembangunan dalam jangka pendek, menengah, maupun Panjang(Hidayat & Salahudin, 2021).

2. Miman nurdiaman, Ade purnama, dan lestari (2020)

Judul penelitian ini adalah perencanaan pembangunan infrastruktur di desa sukatani kabupaten garut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembangunan infrastruktur di desa sukatani sudah sesuai dengan regulasi yang ada yaitu peraturan menteri dalam negeri nomor 114 tahun

2014 tentang pedoman pembangunan desa, dimana dijalankan suatu perencanaan mulai dari musyawarah ditingkat dusun, musyawarah ditingkat desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Pada tahap perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa sukotani menitikberatkan pada pembangunan jalan desa dan jalan lingkungan sebagai sarana transportasi umum, karena hal ini sejalan dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat desa sukotani. Dalam proses perencanaan terdapat faktor penghambat yaitu kurangnya sumber daya masyarakat, kurangnya sosialisasi pelaksanaan dan pemerintah desa tidak melibatkan masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat sehingga menyebabkan kurangnya partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur (Nurdiaman et al., 2019).

3. Alpiamus malo dan Firman Firdausi (2019)

Judul penelitian ini adalah upaya perencanaan pembangunan desa dalam bidang infrastruktur untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa tahapan pembangunan yaitu: efisiensi dan rasionalitas, peran dan profesionalisme kelembagaan sudah berjalan dengan baik, apa tugas dan tanggung jawab pemerintah desa, dan mengubah atau memperluas pilihan-pilihan untuk mencapai tingkat kesejahteraan serta hasil kesepakatan antara pemerintah dengan masyarakat diterima dengan baik. Sehingga program pembangunan infrastruktur di tahun 2017 merupakan bagian program program infrastruktur berjalan dengan keefektifan waktu dan biaya sehingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur seperti jalan paving ke pertanian, jalan makadam, saluran irigasi pertanian plengsengan dan pelebaran jalan di desa giripurno memperoleh hasil yang maksimal terlaksana dengan baik. Jadi, dengan adanya fasilitas

seperti jalan paving ke pertanian itu sangat membantu masyarakat Bertani dalam memudahkan para petani untuk mengangkut hasil panen, begitujuga dengan adanya saluran irigasi ke pertanian sangatlah membantu para petani untuk lebih semangat dalam bekerja di lading pertanian(Malo & Firdausi, 2019).

4. Ahmad mufarrihun (2019)

Judul penelitian ini adalah Strategi Pembangunan Infrastruktur Desa Mandalasari Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa peran manajemen desa dan partisipasi masyarakat sangat berpengaruh dalam pembangunan diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan, khususnya dalam pembangunan infrastruktur desa sesuai dengan program dan perencanaan pembangunan desa.

Program yang sedang berjalan ada PTSL atau pembuatan sertifikat tanah. Adapun program yang sedang berjalan di Desa Mandalasari Kecamatan Kaduhejo Kabupaten pandeglang yaitu pembuatan pembangunan jalan paving blok dan drainase. Namun, masih ada tantangan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, yaitu dari lahan masyarakatnya yang masih sengketa dan ada yang mengijinkan ada yang tidak serta mengijinkan. Saat ini pembangunan infrastruktur di daerah pedesaan umumnya masih dibatasi oleh terbatasnya akses masyarakat pedesaan terhadap pengambilan kebijakan pembangunan yang akan dilakukan di desa, hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat desa terkait masalah pembangunan yang akan dilakukan.

Permasalahan pembangunan di daerah pedesaan, dapat diselesaikan dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Salah satu faktor pendukungnya adalah partisipasi masyarakat dalam perencanaan

pembangunan infrastruktur, pembebasan lahan dan perencanaan anggaran yang tepat(Mufarrihun, 2019).

5. Anisa Ana Fitrianti, Romadhan dan Salahuddin (2022)

Judul penelitian ini adalah Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan: Kajian Pustaka Terstruktur. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa perencanaan pembangunan desa merupakan suatu hal yang tidak semata-mata karena adanya sebuah kesempatan melainkan hal tersebut adalah hasil dari penentuan pilihan dari beberapa proses kegiatan dan bukan dari hasil yang tidak terencana namun karena adanya perencanaan yang baik. Untuk menyelenggarakan kewenangan tersebut maka pemerintah desa perlu menyusun perencanaan desa yang tentunya melibatkan seluruh komponen yang terkait seperti masyarakat desa dan stakeholder.

Dengan demikian proses perencanaan yang baik kedepannya akan menghasilkan hasil yang baik dari pelaksanaan program yang pada akhirnya akan menumbuhkan rasa partisipasi masyarakat yang tinggi dalam hal keterlibatan pada pembangunan desa.

Dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan sangat perlu adanya dukungan dari beberapa stakeholder yang terkait. Selain itu, dalam hal optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam desa juga perlu dilakukan. Hal ini dikarenakan dalam bidang infrastruktur yang pertama diutamakan adalah terkait sumber daya alam yang dimiliki oleh desa itu sendiri. Optimalisasi sumber daya alam desa juga perlu diikuti dengan pengembangan sumber daya manusia desa, karena salah satu terwujudnya pembangunan desa yang ideal adalah partisipasi masyarakat desa itu sendiri dalam membantu mewujudkan pembangunan yang ideal. Maka dari itu perlu adanya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat lokal desa,

meskipun perencanaan pembangunan desa bekerjasama dengan masyarakat lokal desa, tetap ada tindakan inovatif terhadap integrasi pada tingkat desa. Selain itu pemerintah dengan pihak pihak yang bekerja sama dalam pembangunan desa juga perlu memperhatikan keragaman desa, hambatan serta strategi untuk mewujudkan pembangunan desa yang ideal.

Kajian dalam penelitian ini membahas tentang perencanaan pembangunan desa yang mencakup ke dalam 7 klaster dan memiliki tiga topik utama. Selain itu terlihat ada 145 konsep dari 276 artikel yang didapat melalui database Scopus.

Hasil revidu menggunakan VOSviewer menunjukkan bahwa terdapat tiga konsep yang dominan dalam tema studi perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan yaitu membahas konsep terkait Rural Area, Land dan Rural Development (Fitrianti et al., 2022).

6. Dina Banurea dan Dr. Mahmuddin, M.Si (2018)

Judul dari Penelitian ini adalah Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa. Hasil penelitian ini mejelaskan bahwa penggunaan dana desa tahun anggaran 2016 diutamakan dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Tetapi dana desa lebih di lebih di arahkan ke pembangunan desa yaitu bidang pembangunan infrastruktur prasarana Kawasan pertanian, disebabkan masyarakat desa mayoritas adalah seorang petani sehingga pembangunan tersebut dibutuhkan oleh masyarakat di Desa Perolihen Kecamatan Sitellu Tali Urang Jahe Kabupaten Pakpak Barat.(Banurea & Mahmuddin, 2018).

7. Fahrul Rhida (2019)

Judul penelitian ini adalah Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam

Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Langsa Kota Langsa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa digunakan secara efektif, meskipun pengalokasiannya belum 100% efektif. Upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yaitu dengan melakukan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat (RIDHA, 2019).

8. Marselina Ara Lili (2018)

Judul penelitian ini adalah Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar. Hasil dalam penelitian ini Membuktikan bahwa pengelolaan keuangan di Desa Magmagan Karya telah Memenuhi ketentuan yang di ditentukan oleh pemerintah pusat yang mengacu pada peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014, dimana dalam proses pembiayaan, melewati prosedur perencanaan, pelaksanaan pencairan dana, pengorganisasian, pelaporan, pertanggung jawaban dan publikasi. Dalam menentukan prioritas pemanfaatan dana sesuai peraturan Menteri desa nomor 21 tahun 2015 serta berpedoman pada RKP dan RPJMN Desa, dimana dalam Penyusunan RKP dan RPJMN Desa melibatkan seluruh aspek pemerintahan, BPD dan masyarakat umum. Penggunaan Dana sudah sesuai dengan fisis misi BPMPD Kalimantan Barat, terbukti dengan adanya prioritas pembangunan (Lili, 2018).

9. Archan Yudistira, Endang Indartuti dan Bagoes Soenarjanto (2019)

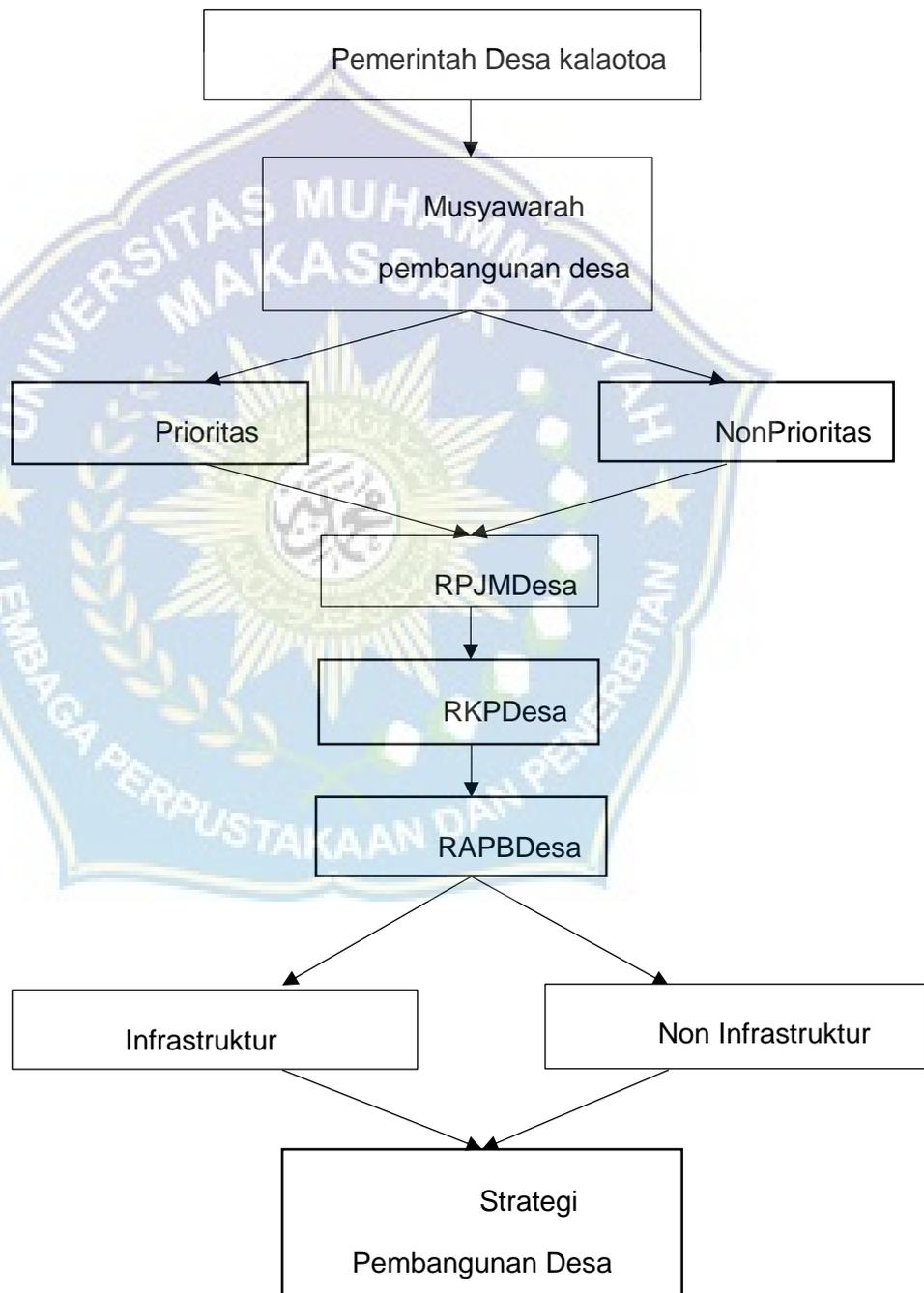
Judul Penelitian ini adalah Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018 Bagi Pembangunan Infrastruktur Di Desa Ngimbangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. Hasil dari penelitian ini adalah Memperlihatkan bahwa

Pengelolaan dana desa di Desa Ngimbangan dilihat dari kedisiplinan melakukan perintah (perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan) yang dipimpin oleh kepala desa selaku pimpinan tertinggi di pemerintah desa sudah bekerja secara efektif (Archan Yudistira¹, Endang Indartuti², 2018).

10. Nurfaizal, Mutiarin dan sakir (2019)

Judul penelitian ini adalah Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tegalrejo Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam hal pembangunan infrastruktur di desa Tegalrejo kurang baik. Hal ini disebabkan oleh serangkaian masalah yaitu: belum ada rincian waktu dalam hal waktu pelaksanaan. Kurangnya transparansi dalam penyampaian laporan pengelolaan keuangan, tidak semua masyarakat terlibat secara aktif dalam pembangunan infrastruktur, Kurang maksimal dalam memanfaatkan Sistem Informasi Desa (SID) sebagai sarana dalam menginformasikan laporan pengelolaan dana desa, kurangnya koordinasi perangkat desa terhadap masyarakat dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur (Suryana, 2019).

C. Kerangka Konsep



Gambar 2. 1 **Kerangka Konsep**



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam dan utuh mengenai berbagai fenomena atau kejadian yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi instrument penting adalah peneliti dan hasil penelitiannya berupa pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi penelitian agar dapat memilih mana data yang relevan dan yang tidak relevan. Fokus pada penelitian ini adalah bagaimana strategi pembangunan infrastruktur yang disusun oleh pemerintah desa kalaotoa.

C. Situs dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di desa kalaotoa kecamatan pasilambena, kabupaten kepulauan selayar. Penelitian ini diperkirakan akan berlangsung selama 2 bulan, yakni dari bulan April sampai bulan Mei 2023.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan data dalam bentuk data primer dan sekunder.

1. Data primer

Data primer merupakan data yang di peroleh dari pihak pertama atau tanpa perantara (Sugiono, 2019:194). Data primer secara khusus dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti mengumpulkan data primer dengan metode wawancara.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan yang pengumpulannya tidak secara langsung tetapi lewat perantara misalnya lewat dokumen (Sugiyono, 2018:456).

E. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah individu yang memiliki informasi tentang topik penelitian. Dalam penelitian ini, informan berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan Teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono, "Teknik purposive sampling adalah Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu" (Sugiyono, 2010:300).

Peneliti menggunakan purposive sampling dengan alasan agar data yang dikumpulkan benar-benar real dengan mewawancarai narasumber yang memahami atau yang bekerja dalam bidang tersebut.

Tabel 3. 1 Jumlah Informan

No	Informan	Jumlah informan
1	Kepala desa	1
2	Sekretaris	1
3	Bendahara	1
4	Tokoh masyarakat	4
5	BPD	1
	Jumlah	8

F. Teknik pengumpulan data

Berdasarkan pendapat Zulkifli A. M. , "Data adalah keterangan berupa fakta atau bukti mengenai suatu realita yang masih mentah, masih berdiri sendiri, belum tersusun, dan belum diolah. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah Observasi, Wawancara, Dokumentasi.

1. Wawancara

Wawan cara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dua orang untuk bertukar ide dan informasi melalui tanya jawab sehingga dapat di konstruksi makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2019).

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dan data berupa buku, arsip maupun dokumen dalam bentuk laporan serta keterangan yng mampu menunjang penelitian (Sugiyono, 2018:476).

3. Observasi

Menurut sugiono Obserfasi merupakan suatu proses penelitian mengamati situasi dan kondisi.

G. Metode Analisis Data

Adapun tahap analisis data, peneliti mengacu pada tahapan yang digambarkan Miles dan Huberman (2013), antara lain:

1. Pengumpulan data melalui wawancara terhadap informan utama atau responden yang ahli yang dapat memberikan data yang tepat tentang informasi penelitian, kemudian observasi langsung ke lapangan untuk membantu penelitian yang dilakukan agar mendapat data yang diharapkan.
2. Reduksi data (data reduction) yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, perubahan data mentah yang muncul dari catatan-catatan di lapangan selama penelitian. Transkrip data (transformasi data) bertujuan untuk memilih data mana yang dianggap sesuai dan tidak sesuai dengan isu yang menjadi pusat penelitian di lapangan.
3. Penyajian data (data display) yaitu kegiatan pengumpulan data dalam bentuk naratif, grafik jaringan, table dan bagian yang direncanakan untuk mempertajam pemahaman penelitian terhadap data yang dipilih kemudian

disajikan dalam bentuk table ataupun penggambaran logis.

4. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing atau verification), yang mencari pentingnya ilustrasi, konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proposisi. Penarikan kesimpulan harus secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan sehingga data diuji validitasnya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Kalaotoa

Nama Desa Kalaotoa bertolak pada sejarah yang ada di pulau kalaotoa yang memiliki sebuah mustika yang berumur sangat tua, Yang dalam Bahasa selayar dinamakan Kalahu Toa. Keberadaan mustika tersebut berlokasi di onemelangka dan sering memancarkan cahaya yang sangat terang. Oleh karena itu pulau tersebut dinamakan pulau kalahu toa, kemudian disederhanakan penyebutannya menjadi Pulau Kalaotoa.

Kepala desa pertama yang memimpin di Desa Kalaotoa bernama Demma lihungan yang diangkat pada tahun 1972, kemudian kepala desa yang berikutnya adalah Demma Tinggi, Denta Rani, Penjabat sementara ABD.Rajab, Demma Toreang, Kemudian dilakukakn pemilihan umum kepala desa yang pertama dan yang terpilih adalah Saharuddin, Ansar, Daeng Situru, Kemudian kepala desa yang sekarang yaitu Muh. Dahlan yang memasuki periode ketiga dalam masa jabatannya.

2. Demografi Desa Kalaotoa

Desa Kalaotoa merupakan desa yang secara administratif termasuk kedalam Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar dan terletak dipulau kalaotoa sendiri. Desa ini mempunyai luas wilayah daratan mencapai 42,69 Km² dan secara administratif pemerintahan terbagi menjadi 4 wilayah dusun yakni Dusun Latokdok Timur, Dusun Latokdok Barat, Dusun Bonto-Bonto, dan Dusun Barumbung. Desa Kalaotoa mempunyai jumlah penduduk 1.419 orang dengan jumlah kepala keluarga mencapai 370 KK. Keseluruhan

masyarakat di desa kalaotoa beragama islam.

Sebagian wilayahnya relative berbukit dan sebagian penduduk berada di pesisir pantai. Secara umum jenis dan kesuburan tanahnya dapat dilihat dari segi warna tanahnya yang coklat dengan tekstur padat dan berbatu. Secara umum bentuk topografi daratan desa kalaotoa merupakan dataran tinggi dengan ketinggian dari permukaan laut sekitar 0-250 meter dengan curah hujan rata-rata pertahun selajqma 5 bulan dan keadaan suhu udara rata-rata sekitar 20-30⁰C.

Perekonomian Desa Kalaotoa bertumpu pada sector perkebunan kelapa. Disamping itu ada beberapa sektor pendukung diantaranya pertanian, peternakan, perikanan, dan jasa perdagangan dan angkutan dengan fasilitas sarana perekonomian berupa pasar desa sebanyak 1 buah. Mata pencaharian masyarakat Desa Kalaotoa terdiri dari petani, nelayan, buruh tani, pedagang, pegawai negeri, TNI/Polri, tukang kayu dan tukang batu.

B. Penyajian Data (Hasil Penelitian)

Setelah melakukan observasi, wawancara dan Menganalisis dokumen dokumen yang terkait yaitu RPJMDes, RKP, dan APBDDes, maka pada tahap ini akan dipaparkan hasil penelitian tentang Strategi Pembangunan Infrastruktur di Desa Kalaotoa.

1. Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Kalaotoa

a. Pendapatan Desa Kalaotoa

Dana Desa merupakan Dana yang berasal dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang di pergunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Pendapatan Desa

Kalaotoa tahun anggaran 2022 sebesar Rp.1.865.148.371,00 (Satu miliar delapan ratus enam puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah). Pendapatan Desa Kalaotoa yang tercantum Didalam APBDesa Kalaotoa dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Pendapatan Desa Kalaotoa Tahun Anggaran 2022

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1				
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer			1.865.148.371,00
4.2.1.	Dana Desa			1.037.508.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa			1.037.508.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			16.775.140,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			16.775.140,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			802.025.631,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			8.539.600,00
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya			8.539.600,00
4.3.5.01.	Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya			8.539.600,00
	01. PENGEMBALIAN LHP TAHUN 2020 (DDSI)	1 LS	8.539.600,00	8.539.600,00
	01. ALOKASI DANA DESA (ADD)	1 LS	802.025.631,00	802.025.631,00
	01. BAGI HASIL PAJAK	1 LS	13.420.110,00	13.420.110,00
	02. BAGI HASIL RETRIBUSI	1 LS	3.355.030,00	3.355.030,00
	Alokasi Dana Desa			802.025.631,00
	JUMLAH PENDAPATAN			1.865.148.371,00
Disetujui, KEPALA DESA KALAOtoa MUH. DAHLAN		LATOKDOK BARAT, 22 May 2022 SEKRETARIS DESA KALAOtoa MUH. ARIS		

Sumber : APBDesa Kalaotoa

Dari data pada tabel 4.1 jelas bahwa pendapatan Desa Kalaotoa pada tahun 2022 hanya bersumber dari Pendapatan transfer yaitu Dana Desa sebesar Rp.1.037.508.000, Bagi hasil pajak dan retribusi sebesar Rp.16.775.140, Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.802.025.631 dan

pengembalian LHP tahun 2020 sebesar Rp.8.839.600 . Sedangkan untuk pendapatan asli desa sendiri tidak ada penghasilan yang di peroleh baik dari hasil usaha desa maupun pendapatan desa yang lain. Hal ini menjadi suatu problematik bagi Desa Kalaotoa, mengetahui pentingnya Pendapatan asli desa sebagai suatu indikator keberhasilan pembangunan di desa.

Pendapatan asli desa memiliki peran yang sangat penting bagi pembangunan desa. Diantaranya yaitu dapat meningkatkan pengelolaan dan pengembangan suatu desa sehingga tercipta kemandirian desa dalam memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas-fasilitas umum di desa.

b. Pengeluaran Desa Kalaotoa

Pengeluaran Desa merupakan pembiayaan yang di keluarkan oleh desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan baik dalam pemberdayaan masyarakat maupun pembangunan infrastruktur desa. Penggunaan Dana Desa di Desa Kalaotoa dalam pembangunan infrastruktur sebesar 60% dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa). Hal ini disampaikan pada saat wawancara dengan Sekretaris desa maupun bendahara desa. Adapaun hasil wawancaranya yaitu:

“Pengalokasiannya disitu sesuai dengan jknisi yang ditentukan oleh kementrian, dana yang dialokasikan sebesar 60% dari APBDes” (Hasil wawancara dengan sekretaris desa, 26 Mei 2023).

“Penggunaan dana desa sesuai dengan undang undang dari mentri keuangan yang terbagi dalam: pemberdayaan 30%, Pembangunan 60% dan untuk tahun ini berubah lagi karena adanya kovid dan juga

Pengentasan kemiskinan ekstrim, digunakan juga untuk ketahanan pangan dan covid. Fokus pembangunan dengan menggunakan dana desa hanya jalan tani dengan kesehatan” (Hasil wawancara dengan bendahara desa, 19 Mei 2023).

Data pengeluaran Desa Kalaotoa tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2
Pengeluaran Desa Kalaotoa Tahun Anggaran 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.856.308.771,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.839.600,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.865.148.371,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>706.125.590,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	647.790.450,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29.400.000,00	ADD
	1.1.01	5.1. Belanja Pegawai	29.400.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	270.540.000,00	ADD
	1.1.02	5.1. Belanja Pegawai	270.540.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.971.200,00	ADD
	1.1.03	5.1. Belanja Pegawai	17.971.200,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D. Perlengkapan Perkantoran, pakaian	109.725.500,00	ADD
	1.1.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	109.725.500,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	91.200.000,00	ADD
	1.1.05	5.1. Belanja Pegawai	91.200.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	24.553.750,00	ADD
	1.1.06	5.2. Belanja Barang dan Jasa	24.553.750,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	28.800.000,00	ADD
	1.1.07	5.2. Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	
	1.1.99	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	75.600.000,00	ADD
	1.1.99	5.1. Belanja Pegawai	18.000.000,00	
	1.1.99	5.2. Belanja Barang dan Jasa	57.600.000,00	
	1.3.	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	8.378.750,00	
	1.3.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	8.378.750,00	PBH
	1.3.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa	8.378.750,00	
	1.4.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	41.560.000,00	
	1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8.348.750,00	ADD
	1.4.03	5.2. Belanja Barang dan Jasa	8.348.750,00	
	1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	24.357.500,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.357.500,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	8.853.750,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.853.750,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	8.396.390,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	8.396.390,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.396.390,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>372.205.514,82</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	63.200.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	42.000.000,00	ADD, DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	4.800.000,00	ADD
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	16.400.000,00	ADD
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	146.409.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	34.019.000,00	ADD, DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.669.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	1.350.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	105.190.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	102.190.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	7.200.000,00	ADD
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	162.596.514,82	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	61.225.476,78	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	61.225.476,78	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	101.371.038,04	DDS
2.4.14	5.3.	Belanja Modal	101.371.038,04	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>66.944.531,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	49.200.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	6.000.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masyarakat. Skala Lokal Desa	43.200.000,00	ADD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.200.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	17.744.531,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.03		Pembinaan PKK	17.744.531,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.744.531,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	319.473.373,18	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	113.687.773,18	
4.1.04		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	113.687.773,18	DDS
4.1.04	5.3.	Belanja Modal	113.687.773,18	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	202.785.600,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	185.815.600,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	185.815.600,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	16.970.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.970.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	3.000.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	3.000.000,00	ADD
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	426.581.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	8.981.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	8.981.000,00	ADD
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	8.981.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	417.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	417.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	417.600.000,00	
JUMLAH BELANJA			1.891.330.009,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			(26.181.638,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	26.181.638,00	
PEMBIAYAAN NETTO			26.181.638,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

Sumber : APBDesa, 2022

Dari data pada tabel 4.2 dapat dijelaskan bahwa anggaran yang dikeluarkan dalam pembangunan Infrastruktur pada tahun 2022 berjumlah Rp.691.678.887, yang terdiri dari bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp.372.205.514 dan bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.319.473.373.

2. Program Pembangunan Desa

Prioritas pembangunan desa merupakan Permasalahan yang

mebutuhkan penanganan secara serius, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat guna memperlancar mobilitas perekonomian dan meningkatkan pendapatan desa dan menekan angka kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan.

Dalam pembangunan di Desa Kalaotoa ada 5 hal yang menjadi prioritas dari pembangunan desa. Berikut hal-hal yang dijadikan prioritas pembangunan sesuai dengan RPJM Desa tahun 2020-2026.

1. Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana seseorang atau sekelompok masyarakat tidak mampu menyediakan kebutuhan pokoknya secara layak, memadai dan berkesinambungan. Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang kompleks di desa yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan antara lain: Tingkat pendapatan, akses terhadap barang dan jasa, kondisi lingkungan, kesehatan, Pendidikan dan geografis.

2. Pengurangan Angka Pengangguran

Permasalahan pengurangan angka pengangguran masih menjadi hal mendasar yang membutuhkan penanganan secara serius dan terutama bagaimana menyediakan lapangan pekerjaan yang layak dan memadai agar tenaga kerja yang ada di desa dapat terserap sepenuhnya kedalam sektor-sektor pekerjaan yang ada.

3. Pembangunan Infrastruktur

DasarFaktor letak dan kondisi geografis yang terpisah dari daratan Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulaawesi Selatan, Disadari sebagai karakteristik dari daerah kepulauan yang selama ini dianggap

sangat memerlukan ketersediaan infrastruktur untuk menunjang perputaran roda perekonomian desa. Permasalahan infrastruktur dasar dapat dikelompokkan ke dalam 2 hal:

a. Prasarana dasar untuk pertanian dan prasarana pendukung masih belum memenuhi kebutuhan dan sampai saat ini ketersediaan prasarana pertanian seperti penyuluh pertanian belum terpenuhi.

b. Kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih dan energi listrik belum memenuhi kebutuhan. Kedua hal tersebut memiliki kaitan yang kuat terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

4. Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan Dasar yang Berkualitas

Garis besar permasalahan Pendidikan dapat dikelompokkan kedalam 2 kelompok, yaitu: keterjangkauan pelayanan Pendidikan dan kualitas yang meliputi kualitas proses dan keluaran dari masing masing satuan Pendidikan, baik Pendidikan formal maupun non formal. Di Desa Kalaotoa, tingkat Pendidikan formal masyarakat dirasakan relative masih rendah. Dalam konteks Penyelenggaraan Pendidikan non formal, dengan sasaran peningkatan keterampilan bagi pemuda di desa masih diperhadapkan pada permasalahan tenaga pendidik dan ketersediaan sarana dan prasarana yang belum memadai. Dalam peningkatan layanan kesehatan, meskipun merupakan program prioritas setiap tahunnya, masih terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat yang membutuhkan perhatian yang serius. Permasalahan yang dimaksud adalah sarana dan prasarana kesehatan yang masih belum maksimal.

5. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pendapatan perkapita masyarakat masih rendah bila dibandingkan tingkat kebutuhan pembiayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Oleh sebab itu masyarakat masih memerlukan peningkatan dalam kegiatan perekonomiannya.

3. Strategi Pembangunan Infrastruktur Desa Kalaotoa

Strategi pembangunan Infrastruktur di Desa Kalaotoa telah melalui berbagai proses yang telah disusun didalam perencanaan pembangunan desa. Proses awal dari perencanaan pembangunan desa diawali dengan musyawarah ditingkat dusun, kemudian hasil dari musyawarah itu di bawah ke musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat desa. Didalam musyawarah itu didiskusikan mengenai permasalahan dan pembangunan yang akan di laksanakan sesuai dengan hasil dari musyawarah yang disusun didalam RPJMDesa.

Namun yang menjadi permasalahan dari penyusunan RPJMDes ini adalah apakah masyarakat yang di undang untuk menghadiri musyawarah mampu mewakili keinginan masyarakat secara keseluruhan. Berikut hasil dari wawancara dari beberapa tokoh masyarakat.

“Yang menjadi kendala atau permasalahan biasanya hanya kelompok kelompok tertentu yang di dengar aspirasinya” (Hasil wawancara dengan AM,19 Mei 2023).

“Ketika di musrembang kemudian di rampungkan semua usulan kadang kadang implementasinya tidak sesuai dengan yang dimusrembangkan dan juga kadang tidak sesuai dengan aspirasi utamanya masyarakat” (Hasil wawancara dengan HR,19 Mei 2023).

Dari hasil wawancara diatas bisa kita simpulkan bahwa masyarakat yang di undang dalam menghadiri musyawarah tidak mampu mewakili masyarakat secara keseluruhan disebabkan adanya kelompok tertentu yang terbentuk dalam sistem politik di Desa kalaotoa. fenomena sosial yang seperti ini dapat juga menyebabkan, hasil dari musyawarah tidak sejalan dengan impementasi kebijakan yang diambil.

Jadwal pelaksanaan musyawarah ditingkat dusun sesuai dengan RPJMDesa Kalaotoa dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3
Jadwal Pelaksanaan Musyawarah Tingkat Dusun Desa Kalaotoa

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat
1	Musdus Barumbung	1 April 2020	Kantor Desa
2	Musdus Bonto-Bonto	15 April 2020	Kantor Desa
3	Musdus Latokdok Barat	22 April 2020	Kantor Desa
4	Musdus Latokdok Timur	6 Mei 2020	Kantor Desa

Sumber : RPJMDesa Kalaotoa, 2020

Adapun hasil dari wawancara terhadap Perangkat desa dan Masyarakat yang terlibat didalam perencanaan pembangunan desa sebagai berikut.

“Proses awalnya yaitu dilakukan dulu musrembang dusun setelah itu musrembang desa selasi itu baru kita lakukan penyesuaian APBD sesuai dengan usulan masyarakat”(Hasil wawancara dengan sekretaris desa, 26 Mei 2023).

“Prosenya diawali dari musyawarah dusun kemudian ke musyawarah desa Kemudian disepakati oleh BPD setelah itu di terlebih dahulu dibuatkan RKP, kemudian dibuatkan APBDes sesuai dengan RPJMDes yang telah di susun” (Hasil wawancara dengan bendahara desa, 19 Mei 2023).

“Setiap awal tahun dilakukan musyawarah di tingkat dusun untuk

merumuskan perencanaan ditingkat dusun Kemudian hasilnya itu di bawah ke musyawarah di tingkat desa “(Hasil wawancara Dengan AM,19 Mei 2023).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa strategi pembangunan infrastruktur di Desa Kalaotoa melewati berbagai tahapan yang dilakukan secara terstruktur agar menghasilkan suatu perencanaan pembangunan yang dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

RPJMDesa disusun lewat musyawarah desa Kalaotoa pada tanggal 2 Juni tahun 2020 yang berlokasi di kantor Desa Kalaotoa. Pada forum ini dibahas tentang hasil lokakarya desa yang sudah diformulasi dalam bentuk RPJMDesa dan Rancangan Peraturan Desa (perdes) RPJMDesa. Urutan pelaksanaan dan tahapan penyusunan RPJMDesa Kalaotoa dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4
Urutan Pelaksanaan dan Penyusunan RPJMDesa

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat
1	Pembentukan Pokja	16 Februari 2020	Kantor Desa
2	Pembekalan Tim Pokja RPJMDesa	18s/d20 Feb. 2020	Kantor Desa
3	Musdus Barumbung	1 April 2020	Kantor Desa
4	Musdus Bonto-Bonto	15 April 2020	Kantor Desa
5	Musdus Latokdok Barat	22 April 2020	Kantor Desa
6	Musdus Latokdok Timur	6 Mei 2020	Kantor Desa
7	Asistensi Pokja	12 Mei 2020	Kantor Desa
8	Lokakarya Desa	19 s/d 20 Mei 2020	Kantor Desa
9	Musyawah Desa	2 Juni 2020	Kantor Desa

Sumber : RPJMDesa Kalaotoa, 2020

Strategi pembangunan infrastruktur yang dijalankan oleh pemerintah Desa Kalaotoa yaitu meningkatkan dan memantapkan tataguna jalan dan jembatan pengelolaan sumber daya air dan sanitasi lingkungan agar bisa menghasilkan nilai ekonomis yang lebih lama. Berikut merupakan program

pembangunan Infrastruktur desa kalaotoa yaitu:

- a. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
- b. Pembangunan jalan setapak
- c. Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan setapak
- d. Pembangunan MCK/ Jamban keluarga
- e. Pembangunan dan Rehabilitasi saluran air minum

4. Arah Pembangunan Infrastruktur Desa Kalaotoa

Secara garis besar arah pembangunan Desa Kalaotoa dibagi ke dalam 6 arah kebijakan yaitu:

- a) Memantapkan peran dari pemerintah desa dalam menjalankan pelayanan public.
- b) Peningkatan dalam bidang Pendidikan dan ketereampilan sehingga dapat tercapai masyarakat yang cerdas, mandiri, berilmu, dan bertakwa.
- c) Peningkatan dalam bidang kesehatan dan lingkungan sehingga tercipta masyarakat yang sehat dan lingkungan yang bersih.
- d) Peningkatan dalam bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
- e) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui upaya pembangunan sarana dan prasarana desa.
- f) Peningkatan peran dari Lembaga sosial kemasyarakatan, ekonomi, agama dan kepemudaan dalam membangun desa.

Hasil wawancara perangkat desa dan tokoh masyarakat terkait dengan arah pembangunan infrastruktur desa sebagai berikut:

“Arah pembangunan Infrastruktur yang yang ditujukan yaitu meningkatkan

perekonomian masyarakat” (Hasil wawancara dengan sekretaris desa,26 Mei 2023).

“Arah pembangunannya difokuskan kepada pembangunan kualitas pertanian” (Hasil wawancara dengan bendahara desa,19 Mei 2023).

“Kalau arah pembangunannya itu yang saya amati sekarang ini di pembangunan infrastruktur arahnya itu Kepemenuhan fasilitas dasar di masyarakat” (Hasil wawancara dengan AM,19 Mei 2023).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa arah pembangunan Infrastruktur di Desa Kalaotoa di arahkan kepada Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi maupun kesehatan. Walaupun perencanaan pembangunan infrastruktur menyentuh aspek ekonomi tetapi kegiatan ekonomi pertanian maupun peternakan masih bersifat tradisional.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur tahun 2022 sebesar Rp.619.678.887 yang terdiri dari bidang pelaksanaan pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat.
2. Strategi pembangunan infrastruktur di Desa Kalaotoa melewati berbagai proses yaitu dimulai dari musyawarah tingkat dusun kemudian dilakukan musyawarah tingkat desa. Hasil dari musyawarah tersebut kemudian disusun menjadi bentuk RPJMDesa atau Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa. Strategi pembangunan infrastruktur yang dijalankan oleh pemerintah Desa Kalaotoa yaitu meningkatkan dan memantapkan tagatuna jalan dan jembatan pengelolaan sumber daya air dan sanitasi lingkungan agar bisa menghasilkan nilai ekonomis yang lebih lama.
3. Pembangunan infrastruktur lebih diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun keagamaan.

B. Saran

1. Pendapatan Asli Desa harus dihasilkan dengan membangun badan usaha milik desa.
2. Dalam musyawarah untuk menyusun perencanaan pembangunan,

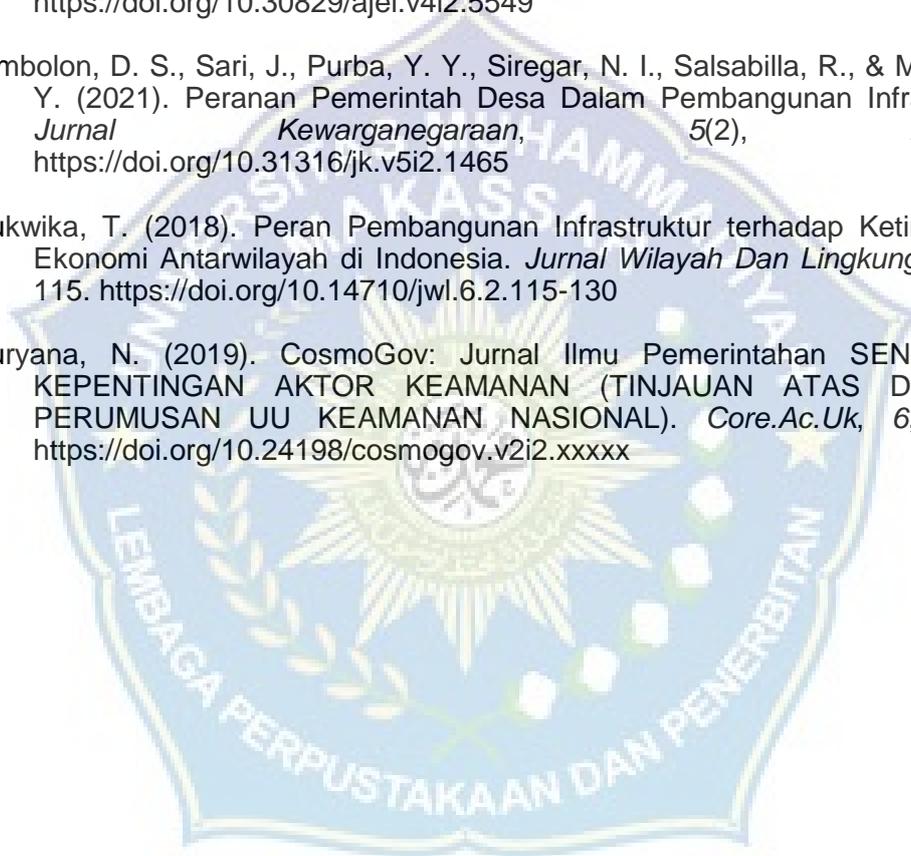
masyarakat yang dilibatkan harus mampu untuk mewakili aspirasi masyarakat.

3. Sebaiknya pembangunan infrastruktur lebih diarahkan kepada satu aspek saja sehingga penggunaan dana desa dapat dimaksimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa Ana Fitrianti, & Ach. Apriyanto Romadhan & Salahudin. (2022). Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan: Kajian Pustaka Terstruktur. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 6(1), 47–64. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2022.6.1.47-64>
- Archan Yudistira¹, Endang Indartuti², B. S. (2018). Jurnal Penelitian Administrasi Publik vol 5 No. 2 Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018 Bagi Pembangunan Infrastruktur Di Desa Ngimbangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1193–1200.
- Banurea, D., & Mahmuddin, D. (2018). Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 3(1), 14. www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP
- Hidayat, R. J. P., & Salahudin. (2021). Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Sebuah Kajian Pustaka Terstruktur (Systematic Literature Review). *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 4(2), 110–128.
- Lili, M. A. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar. *ARTIKEL ILMIAH Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura*, 1(ekonomi), 5–19.
- Malo, A., & Firdausi, F. (2019). Upaya Perencanaan Pembangunan Desa Dalam Bidang Infrastruktur Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(3), 53–58.
- Mufarrihun, A. (2019). Strategi Pembangunan Infrastruktur Desa Mandalasari Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang. *Jurnal KAPemda: Kajian Administrasi Dan Pemerintah Daerah*, 15(9), 59–76.
- Mustanir, A., Sellang, K., Ali, A., Madaling, M., & Mutmainna, M. (2018). Peranan Aparatur Pemerintah Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Tonrongnge Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Ilmiah Clean Government (JCG)*, 2(1), 67–84. <http://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/index.php/clean/article/view/213>

- Nurdiaman, M., Purnawan, A., Fia, R., & Sudirman, L. (2019). *Sukatani Kabupaten Garut*.
- Pratama, A. A. (2019). Perencanaan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Pengalihan Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2018. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JOM FISIP)*, 6, 1–14. [https://www.oecd.org/dac/accountable-effective-institutions/Governance Notebook 2.6 Smoke.pdf](https://www.oecd.org/dac/accountable-effective-institutions/Governance%20Notebook%202.6%20Smoke.pdf)
- RIDHA, F. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Langsa Kota Langsa. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 252. <https://doi.org/10.30829/ajei.v4i2.5549>
- Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., Salsabilla, R., & Manulang, Y. (2021). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 295–302. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.1465>
- Sukwika, T. (2018). Peran Pembangunan Infrastruktur terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Indonesia. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 6(2), 115. <https://doi.org/10.14710/jwl.6.2.115-130>
- Suryana, N. (2019). CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan SENGKARUT KEPENTINGAN AKTOR KEAMANAN (TINJAUAN ATAS DINAMIKA PERUMUSAN UU KEAMANAN NASIONAL). *Core.Ac.Uk*, 6, 58–70. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i2.xxxxx>





1. Surat Izin Penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor :490/05/A.2-II/IV/44/2023 Makassar, 06 April 2023

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar

Di-

Tempat

Dengan Hormat

Dalam rangka proses penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Muhammad Fatwa

Stambuk : 105711105619

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Judul Penelitian : STRATEGI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA
KALAOTOA KECAMATAN PASILAMBENA KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

Dimohon kiranya mahasiswa tersebut dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai tempat mahasiswa tersebut melakukan penelitian

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terimakasih.



Tembusan:

1. Rektor Unismuh Makassar
2. Arsip

2. Surat Izin Penelitian Universitas Muhammadiyah Makassar


MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 1202/05/C.4-VIII/IV/1444/2023 15 Ramadhan 1444 H
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal 06 April 2023 M
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
 di -
 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 490/05/A.2-II/IV/44/2023 tanggal 6 April 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD FATWA
 No. Stambuk : 10571 1105619
 Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Jurusan : Ekonomi Pembangunan
 Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"STRATEGI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA KALAOTOA KECAMATAN PASILAMBENA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 11 April 2023 s/d 11 Juni 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
 Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dattubakar Idhan, MP.
 NEM 101 7716

04-23

3. Surat Penelitian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 24120/R.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Gowa
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-

Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1929/05/C.4-VIII/VII/1444/2023 tanggal 15 Juli 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: RAFLIANTO DWIRGA RATCMAD
Nomor Pokok	: -
Program Studi	: -
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (D3)
Alamat	: -

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara , dengan judul :

" "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 21 Agustus 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. {sp} di Makassar;
2. *Pertinggal.*

4. Surat Keterangan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung MPP Jln. Ahmad Yani Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
 Telepon (0414) 21083, email: pmptpselayar@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 NOMOR : 0607/Penelitian/IV/2023/DIS PMPTSP

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

Nama Peneliti : MUHAMMAD FATWA
 Alamat Peneliti : Dusun Tonjo Desa Kayu Bauk Kec. Bontomatene
 Nama Penanggung Jawab : MUHAMMAD FATWA
 Anggota Peneliti : -

Untuk melakukan penelitian dalam rangka "Untuk menyelesaikan program studi Ekonomi Pembangunan pada Fakultas ekonomi dan bisnis di Universitas Muhammadiyah Makassar" di :

Lokasi Penelitian : Desa Kalaotoa
 Judul Penelitian : Strategi Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kalaotoa Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar
 Lama Penelitian : 2 Bulan
 Bidang Penelitian : Ekonomi Pembangunan
 Status Penelitian : Perorangan

Surat Keterangan Penelitian ini berlaku sampai dengan tanggal 11 Juni 2023




Dikeluarkan : Benteng
 Pada Tanggal : 28 April 2023

A.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
KEPALA DINAS



Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar

Drs. H. ANDI NUR HALIQ, M.Si
 NIP. 19660507 198603 1 022

Rp. 0,-
 Tembusan

1. Kepala Badan Kesbangpol di Benteng
2. Arsip

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 8 ayat 1 "Informasi dan/atau data di dalamnya merupakan data baik yang baik"

- Dokumen ini diterbitkan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sistem Elektronik (BSiE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSN)

- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai scan pada QR Code

5. Wawancara





LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN









6. Coding Wawancara

Informan 1 : Muhammad Aris

Code : MA

Jabatan : Sekretaris Desa

Tempat : Desa Kalaotoa

Hari/Tanggal : Jumat 26 Mei 2023

No	Pelaku Wawancara	Uraian Wawancara
1	Peneliti	Kapan biasanya Peremusan perencanaan Perencanaan di laksanakan?
2	MA	Perencanaan pembangunan biasanya disusun pada awal pemerintahan sekitar bulan 10 atau 11.
3	Peneliti	Siapasaja yang dilibatkan dalam penyusunan Perencanaan pembangunan desa?
4	MA	Yang dilibatkan dalam perencanaan Pembangunan desa adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, BPD, Tenaga didik, tenaga medis dan juga polisi.
5	Peneliti	Bagaimana proses awal dari penyusunan perencanaan pembangunan desa?

6	MA	Proses awalnya yaitu dilakukan dulu musrembang dusun setelah itu musrembang desa selasi itu baru kita lakukan penyesuaian APBD sesuai dengan usulan masyarakat.
7	Peneliti	Program apa saja yang dijalankan pemerintah desa dalam pembangunan Infrastruktur?
8	MA	Program pembangunan infrastruktur yang di jalankan yaitu jembatan, jalan Lorong, sumur gali,WC umum.
9	Peneliti	Bagai mana arah pembangunan infrastruktur yang akan dicapai pemerintah desa?
9	MA	Arah pembangunan Infrastruktur yang yang ditujukan yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Informan 2 : Demma nyampa

Code : DN

Jabatan : Bendahara Desa

Tempat : Desa Kalaotoa

Hari/Tanggal : Jumat 19 Mei 2023

No	Pelaku Wawancara	Uraian Wawancara
1	Peneliti	Bagai mana proses awal dari penyusunan APBDes?
2	DN	Prosenya diawali dari musyawarah dusun kemudian ke musyawarah desa kemudian disepakati oleh BPD setelah itu di terlebih dahulu dibuatkan RKP, kemudian dibuatkan APBDes sesuai dengan RPJMDes yang telah disusun.
3	Peneliti	Bagaimana Penggunaan dana desa dalam pembangunan Infrastruktur?
4	DN	Penggunaan dana desa sesuai dengan undang undang dari menteri keuangan yang terbagi dalam : pemberdayaan 30%, Pembangunan 60% dan untuk tahun ini berubah lagi karena adanya

		kofit dan juga Pengentasan kemiskinan ekstrim ,digunakan juga untuk ketahanan pangan dan covid. Fokus pembangunan dengan menggunakan dana desa hanya jalan tani dengan kesehatan.
5	Peneliti	Bagaimana arah pembangunan Infrastruktur yang akan di dilakukan?
6	DN	arah pembangunannya difokuskan kepada pembangunan kualitas pertanian.
7	Peneliti	Adakah kendala yang dihadapi dalam pengalokasian dana desa?
8	DN	Kurangnya bahan material sehingga biaya yang dikeluarkan lebih besar.
9	Peneliti	Bilamana ada kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa apakah ada evaluasi yang dilakukan?
10	DN	Iya dilakaukan evaluasi apabila ada perubahan atauka pembangunan tidak sesuai target.

--	--	--

Informan 3 : Zaenal Abiding

Code : ZA

Jabatan : BPD

Hari/Tanggal : Jumat 19 Mei 2023

No	Pelaku Wawancara	Uraian wawancara
1	Peneliti	Sebelum di laksanakan pembangunan Infrastruktur apakah di lakukan musyawarah Pembangunan desa?
2	ZA	Ada
3	Peneliti	Apa Ada usulan dari dari pihak BPD terkait pembangunan Infrastruktur dan apakah usulan itu diterima?
4	ZA	Ada dan diterima
5	Peneliti	Bagaimana bentuk usulan yang di usulkan?
6	ZA	Pembangunan jalan tan drainase, rehat jalan tan yang lama.
7	Peneliti	Bagaimana arah pembangunan Infrastruktur di Desa Kalaotoa?

8	ZA	Meningkatkan pertumbuhan perekonomian Masyarakat.
9	Peneliti	Bagaimana peran BPD dalam perencanaan pembangunan desa?
10	ZA	Mengevaluasi Perencanaan Pembangunan yang telah disusun apabila ada yang tidak sesuai dengan keperluan masyarakat.



Informan 4 : Henra Rizki
 Code : HR
 Jabatan : Tokoh Masyarakat
 Hari/Tanggal : Jumat 19 Mei 2023

No	Pelaku Wawancara	Uraian Wawancara
1	Peneliti	Apakah Masyarakat terlibat didalam pembangunan desa?
2	HR	Iya
3	Peneliti	Sebelum dilakukan pembanguana apakah dilaksanakan Musyawarah pembangunan desa?
4	HR	Urutannya itu diadakan musrembang di wilayah dusun, kemudian di musrembangkan lagi di tingkat desa.
5	Peneliti	Apakah dalam musyawarah masyarakat diberikan kesempatan untuk mengeluarkan pendapat?
6	HR	Iya selalu ada kesempatan yang di berikan kepada masyarakat.
7	Peneliti	Apakah program yang dijalankan sesuai

		dengan apa yang diinginkan masyarakat?
8	HR	Ketika di musrembang kemudian di rampungkan semua usulan kadang kadang implementasinya tidak sesuai dengan yang dimusrembangkan dan juga kadang tidak sesuai dengan aspirasi utamanya masyarakat.
9	Peneliti	Apakah ada permasalahan yang dihadapi di dalam pembangunan dan apakah masyarakat terlibat di dalam pembangunan itu?
10	HR	masyarakat dilibatkan didalam pembangunan infrastruktur sebagai tenaga kerja, dan biasa yang menjadi persoalan kadang pembangunannya tidak sesuai dengan yang diharapkan.
11	Peneliti	Apakah arah pembangunan yang di tuju khususnya dalam pembangunan infrastruktur?
12	HR	Kalau gambran umumnya tidak ada.

Informan 5 : Saiful

Code : SL

Tempat : Desa Kalaotoa

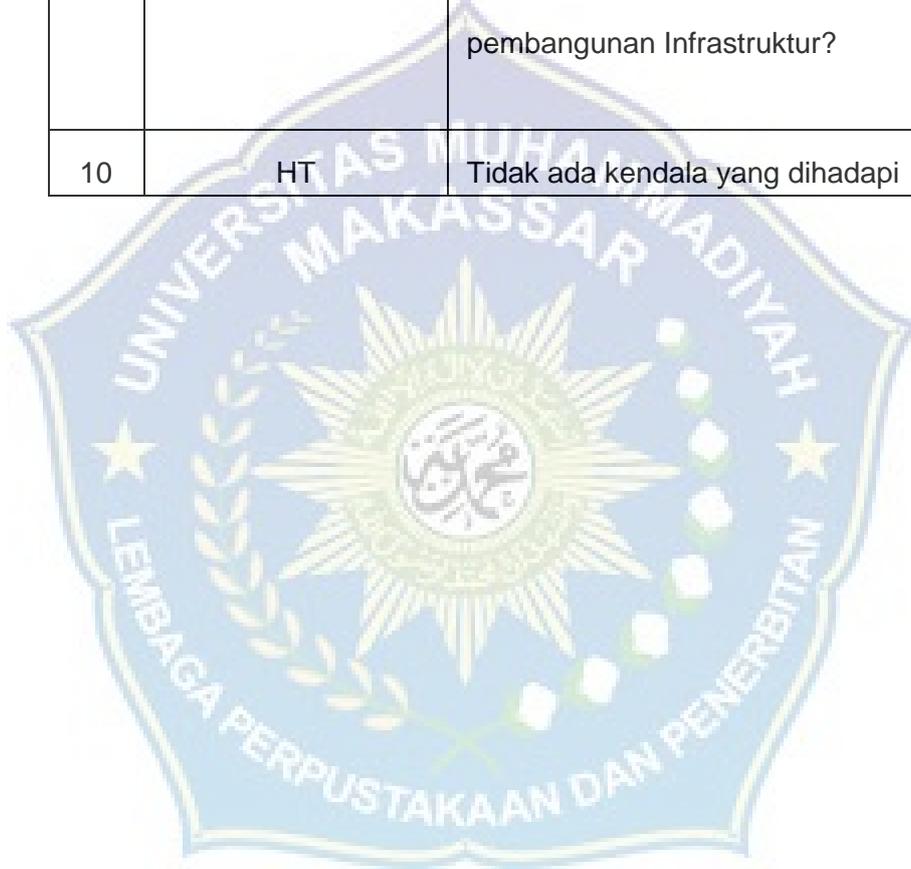
Hari/Tanggal : Jumat 19 Mei 2023

No	Pelaku Wawancara	Uraian Wawancara
1	Peneliti	Sebelum dilakukan pembangunan desa apakah dilakukan musyawarah desa?
2	SL	Dilakukan
4	Peneliti	Bagaimana Peran Masyarakat didalam Penyusunan Perencanaan pembangunan desa?
5	SL	Padasaat musyawarah masyarakat Memberikan usulan untuk pembangunan desa.
6	Peneliti	Bagaimana peran masyarakat di dalam pembangunan infrastruktur?
7	SL	Baik
8	Peneliti	Apakah perencanaan Infrastruktur desa sesuai dengan yang diinginkan masyarakat?
9	SL	Sesuai

Informan 6 : Hartono
 Code : HT
 Jabatan : Tokoh Masyarakat
 Tempat : Desa Kalaotoa
 Hari/Tanggal : Jumat 19 Mei 2023

No	Pelaku Wawancara	Uraian Wawancara
1	Peneliti	Sebelum di laksanakan pembangunan desa apakah dilakukan musyawarah desa?
2	HT	Dimusyawarakan dulu
3	Peneliti	Bagaimana proses dalam musyawarah desa?
4	HT	dilakukan musyawarah ditingkat dusun , baru dimusyawarakan di tingkat desa setelah itu usulan dirampungkan
5	Peneliti	Apakah masyarakat di berikan kesempatan untuk memberikan usulan terkait pembangunan infrastruktur?
6	HT	Iya diberikan kesempatan
7	Peneliti	Apaka perencanaan pembangunan Infrastruktur sudah sesuai dengan yang

		diharapkan oleh masyarakat?
8	HT	Setia pada perencanaan pembangunan sudah sesuai apa yang diharapkan masyarakat.
9	Peneliti	Adakah kendala yang dihadapi didalam pembangunan Infrastruktur?
10	HT	Tidak ada kendala yang dihadapi



Informan 7 : Andi Marzuki
 Code : AM
 Jabatan : Tokoh Masyarakat
 Tempat : Desa Kalaotoa
 Hari/Tanggal : Jumat 19 Mei 2023

No	Pelaku Wawancara	Uraian Wawancara
1	Peneliti	Apakah dalam perencanaan pembangunan apakah dilakukan musyawarah desa?
2	AM	Setiap awal tahun dilakukan musyawarah di tingkat dusun untuk merumuskan perencanaan ditingkat dusun Kemudian hasilnya itu di bawah ke musyawarah di tingkat desa .
3	Peneliti	Bagaimana arah pembangunan Infrastruktur di desa ini?
4	AM	Kalau arah pembangunannya itu yang saya amati sekarang ini di pembangunan infrastruktur arahnya itu Kepemenuhan fasilitas dasar di masyarakat.

5	Peneliti	Apakah perencanaan pembangunan infrastruktur sudah sesuai dengan aspirasi dari masyarakat?
6	AM	Melihat situasi pemerintahan yang ada di desa ini Masih banyak kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat yang belum diakomodir dalam pembangunan di desa karena terkait dengan sumberdaya perangkat desa juga yang sangat minim. Sumber daya yang dimiliki perangkat desa belum mampu mengolah potensi potensi yang ada disini, melihat sejauh mana potensi, kemudian melihat persoalan yang timbul di masyarakat belum mampu dipadukan dalam sebuah konsep untuk perencanaan pembangunan.
7	Peneliti	Adakah kendala yang dihadapi dalam Perencanaan pembangunan Infrastruktur?
8	AM	yang menjadi kendala atau permasalahan biasanya hanya kelompok kelompok tertentu yang di dengar aspirasinya.
9	Peneliti	Apakah semua masyarakat diikuti sertakan dalam Perencanaan

		pembangunan ?
10	AM	Yang dilibatkan dalam Perencanaan ini ada dari unsur pemuda , dari unsur tokoh masyarakat dan tokoh agama, Tokoh Perempuan, Semua Unsur itu telah terpenuhi namun yang jadi masalah apakah unsur unsur itu bisa mewakili masyarakat secara keseluruhan.







BAB I - Muhammad Fatwa
105711105619

by Tahap Tutup

BAB I - Muhammad Fatwa 105711105619

ORIGINALITY REPORT

5%	5%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS



BAB II - Muhammad Fatwa
105711105619

by Tahap Tutup

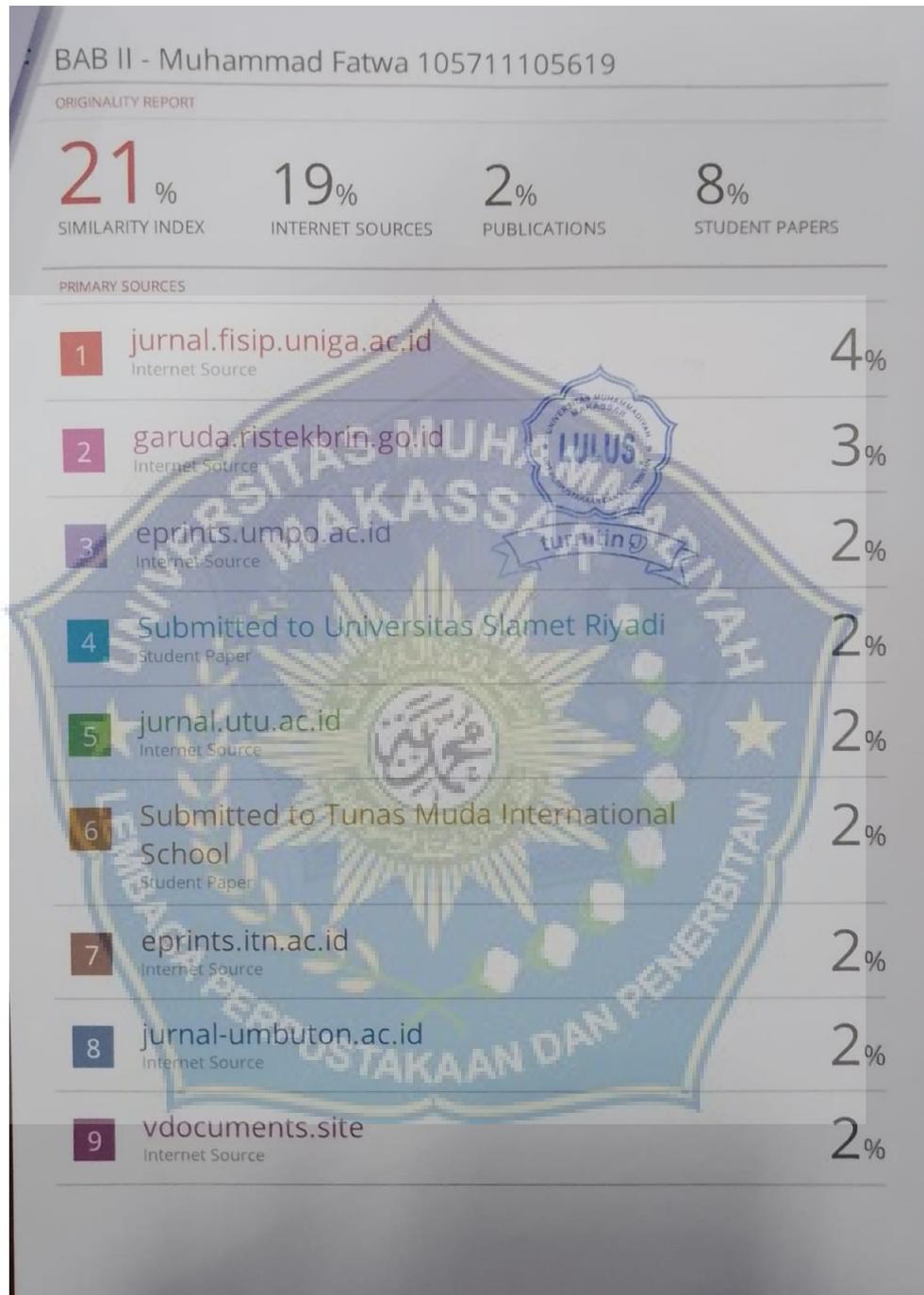
Submission date: 15-Aug-2023 02:16PM (UTC+0700)

Submission ID: 2146113419

File name: BAB_II_2.docx (89.95K)

Word count: 2709

Character count: 18509



www.dosenpendidikan.co.id
Internet Source 2%

Exclude quotes On Exclude matches < 2%
Exclude bibliography On

BAB IV - Muhammad Fatwa 10571110561

ORIGINAL REPORT

10%	10%	0%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

124
★ jefforasatu.sintang.go.id
Internet Source

Exclude quotes Exclude matches < 2%
Exclude bibliography On



BAB V - Muhammad Fatwa 10571110561

ORIGINALITY REPORT

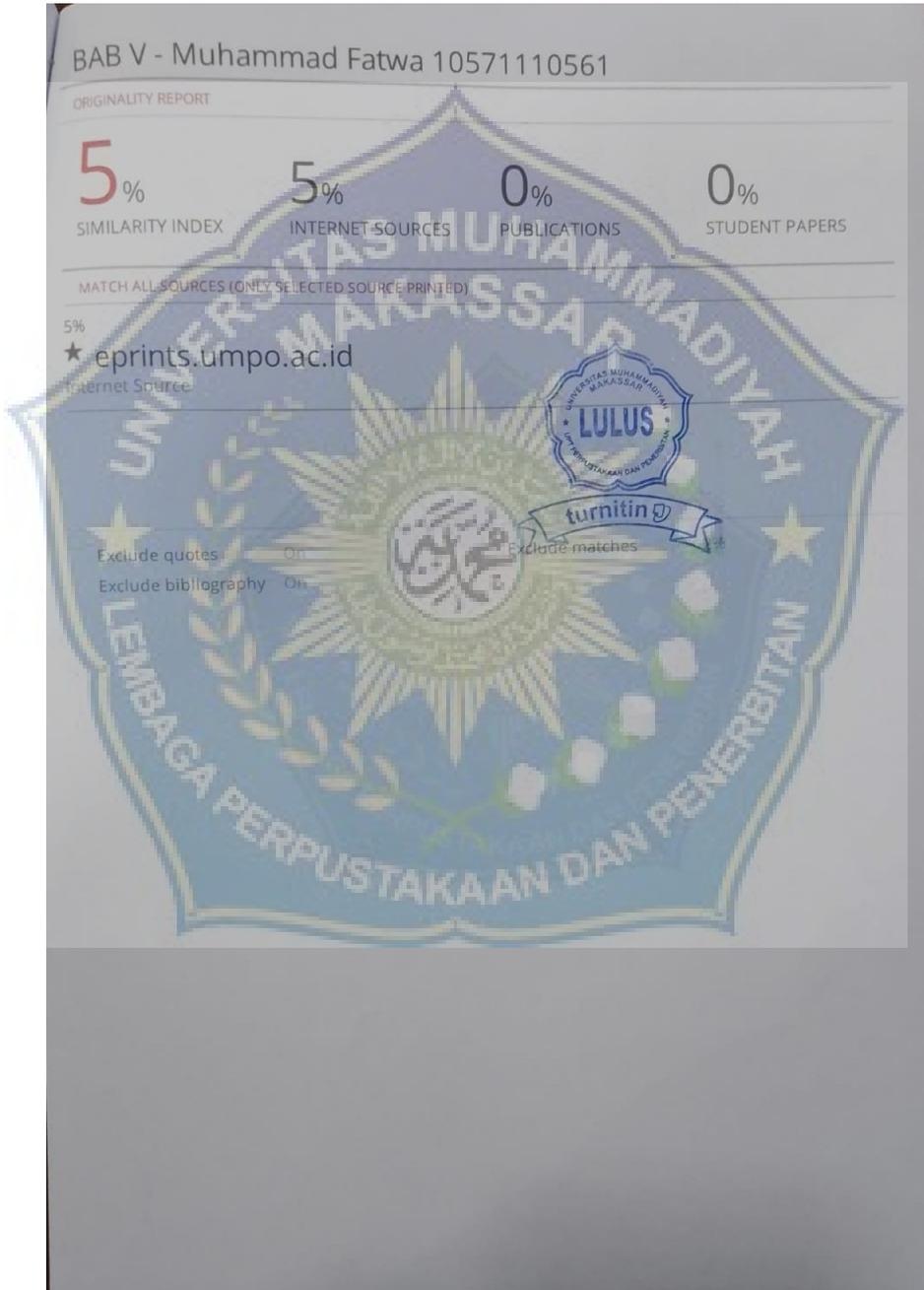
5%	5%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

5%
★ eprints.umpo.ac.id
Internet Source

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches



BIOGRAFI PENULIS



Muhammad Fatwa panggilan Fatwa lahir di Selayar pada tanggal 10 Oktober 2000 dari pasangan suami istri Bapak Basri dan Ibu Salingai. Peneliti adalah anak kedua. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Jl. Tun Abdul Razak, BTN Pao-Pao Permai Blok C5/5, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti SD Negeri Tonjo lulus tahun 2013, SMP Negeri 5 Bontomatene lulus tahun 2016, SMA Negeri 2 Selayar lulus tahun 2019, dan mulai tahun 2019 menjadi mahasiswa jurusan Ekonomi Pembangunan sampai sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

